

Melalui — Telekonferensi, BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA



HADIRI PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN
BPK RI DENGAN POLRI DAN
KEJAKSAAN

18 AGUSTUS 2020

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyepakati sinergitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan. Hal ini merupakan bagian dari ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua BPK **Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA**, dengan Kapolri **Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.** dan Jaksa Agung RI **Dr. H. ST. Burhanuddin, S.H., M.H.**, di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **Komjen. Pol. Drs. Firlil Bahuri, M.Si.**, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA**, serta disaksikan oleh para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), pejabat BPK, Kepolisian (Kapolres), dan Kejaksaan (Kajari) seluruh Indonesia secara virtual.

Secara virtual, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta **Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA** dan Para Pejabat Struktural BPK DKI Jakarta turut menghadiri acara penandatanganan Nota



Kesepahaman di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Hadir Pula Wakapolda Metro Jaya **Brigjen Pol Hendro Pandowo** dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta **DR. Asri Agung Putra**.

Nota Kesepahaman BPK dan Polri berisi tentang kesepakatan kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Sedangkan bersama Kejaksaan, BPK menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum bukan merupakan hal yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara dan/atau unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini instansi yang berwenang adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

"Nota Kesepahaman antara BPK dan Kejaksaan serta BPK dan Polri yang ditandatangani hari ini, dan yang sebelumnya antara BPK dan KPK, akan menjadi langkah baru untuk berkolaborasi, tidak saja dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK namun juga memperkuat kelembagaan kita bersama," jelasnya.



buletin — — tanjidor



Edisi Juli-Agustus-September 2020

DARI REDAKSI

Salam Tanjidor! Halo Pembaca setia Buletin Tanjidor sekaliian semoga senantiasa diberikan Kesehatan oleh Allah SWT, disini kami akan memberikan berbagai informasi edisi Triwulan periode Juli-Agustus-September, yaitu mengenai Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan BPK Dalam mempertahankan kepercayaan dari pemangku kepentingan; Harapan Jusuf Kalla Kepada PMI DKI Jakarta; BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman BPK RI dengan Polri dan Kejaksaan; Bahrullah Akbar Buka Orientasi Kepalangmerahan; BPK dan UI Tandatangani MOU dalam meningkatkan Kapasitas Kelembagaan; BPK melantik Pengurus IPKN Untuk Wilayah DIY dan Jateng.

Dalam Buletin ini masih terdapat Kesalahan-Kesalahan, oleh karena itu kami mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan kritik dan sarannya agar Buletin ini dapat terus memberikan informasi lebih baik dan akurat. Akhir kata kami sampaikan terima kasih. **Salam Tanjidor!**

DAFTAR ISI

- 1 Dari Redaksi
- 1 **JUSUF KALLA** "Dalam menjalankan tugas kemanusiaan dibutuhkan kerja keras dan partisipasi dari semua pihak".
- 2 Bahrullah Akbar Buka Orientasi Kepalangmerahan
- 3 Hasil Pemeriksaan BPK Diharapkan Dapat Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat
- 4 Melalui Telekonferensi, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman BPK RI dengan Polri dan Kejaksaan

BERITA UTAMA

JUSUF KALLA



"DALAM
MENJALANKAN
TUGAS
KEMANUSIAAN
DIBUTUHKAN KERJA
KERAS DAN
PARTISIPASI DARI
SEMUA PIHAK"

18 AGUSTUS 2020

Dalam sambutannya Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyampaikan harapannya kepada Pengurus agar **melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk melaksanakan program kerja PMI DKI Jakarta yang berpedoman kepada AD/ART PMI, Visi-Misi, dan Rencana Strategis PMI**, kata JK.

Dia mengingatkan, dalam menjalankan tugas kemanusiaan dibutuhkan kerja keras dan partisipasi dari semua pihak.

"Maka, kepada segenap jajaran Pengurus untuk dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya," ucap JK.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta **Pemut Aryo Wibowo** mendampingi Tortama KN V BPK **Akhsanul Khaq** ikut hadir dalam

Acara Pelantikan Anggota V BPK RI **Bahrullah Akbar** sebagai Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta Masa bakti 2020 – 2025.

Acara yang digelar pada hari Rabu 5 Agustus 2020 di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh Ketua Umum PMI Pusat, **Jusuf Kalla** yang juga melantik Pengurus PMI DKI Jakarta yang baru, wakil ketua PMI pusat **Ginjar Kartasasmita**, sekjen PMI Pusat **Sudirman Said**, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, **Anies Baswedan**, wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, **Ahmad Riza Patria**, sekretaris daerah, **Saefullah** serta jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

(Walikota) : AF



BAHRULLAH AKBAR

BUKA ORIENTASI — KEPALANGMERAHAN

26 AGUSTUS 2020



JAKARTA, Humas BPK – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) **Bahrullah Akbar** yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020-2025, membuka “Orientasi Kepalangmerahan” pada Rabu (19/08).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Gedung PMI DKI Jakarta, di Jakarta Pusat tersebut, diikuti oleh jajaran Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta Masa Bakti 2020-2025. Selain Bahrullah Akbar, turut hadir memberikan sambutan pada kegiatan ini Ketua PMI DKI Jakarta **Rustam Effendi**.

Adapun jumlah peserta yang berasal dari unsur Dewan Kehormatan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan Unsur Pengurus Provinsi DKI Jakarta sebanyak 17 orang.

Orientasi kepalangmerahan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setelah terbentuknya suatu kepengurusan. Orientasi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pemahaman tentang organisasi kepalangmerahan serta meningkatkan pengetahuan peserta di bidang kepalangmerahan.



HASIL PEMERIKSAAN BPK DIHARAPKAN

DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT
KEPADA MASYARAKAT

14 JULI 2020



JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja sangat diperlukan BPK untuk mempertahankan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Demikian disampaikan Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V **Bahrullah Akbar** saat memberikan sambutan pembukaan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemeriksaan dan Kesekretariatan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, pada Jumat (10/7/2020).

“Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan harus didukung dengan peningkatan profesionalisme para pemeriksa melalui pendidikan berkelanjutan selama minimal 40 jam dalam satu tahun. Saya minta agar seluruh pemeriksa dan pelaksana pada AKN V dapat memenuhi jumlah jam pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan. Hal penting lainnya yang perlu selalu diterapkan dalam pelaksanaan setiap tugas pemeriksaan adalah Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme”, ujar Anggota V BPK.

Anggota V BPK mengingatkan agar para pelaksana BPK senantiasa memperhatikan perkembangan internal maupun eksternal organisasi BPK, termasuk analisis atas perubahan Rencana Kerja Pemerintah, aspek regulasi, hingga pemberitaan media. Hal ini penting dilakukan agar seluruh satker di BPK adaptif dalam menghadapi perkembangan kondisi yang terjadi, sekaligus siap merespon dinamika dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut Anggota V BPK mengatakan bahwa BPK telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang memuat ringkasan pemeriksaan Keuangan, Kinerja dan Pemriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2019 yang merupakan suplemen dalam laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Tahun Anggaran 2019, yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Gubernur. Kedepannya diharapkan penyusunan IHPD ini dapat terus disempurnakan dan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang.

“Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dalam kerangka pemeriksaan LKPD *Long Form Audit Report (LFAR)* dan Penyusunan IHPD ini dilaksanakan dalam rangka memberikan nilai tambah dan manfaat sesuai dengan *International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No.12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens* yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat”, tambahnya.

“Rakornis ini diharapkan juga secara komprehensif dapat membahas rencana pemeriksaan pada Semester II Tahun 2020, khususnya pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 agar dapat mengacu kepada *Desk Strategic Research (DSR)* yang sudah ditetapkan”, ujar Anggota V BPK.

“Saya berharap semoga kebersamaan, sinergi dan koordinasi di lingkungan AKN V akan semakin baik. Mari kita bersama-sama mengawal dan mendukung tugas dan peran aktif BPK dalam melaksanakan pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”, tutup Anggota V BPK.

Hadir dalam Rakornis ini Auditor Utama Keuangan Negara V, **Akhsanul Khaq**, Kepala Auditorat, Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan dan Kepala Sub Auditorat di lingkungan AKN V.